

Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd: Rp.600 Miliar Dana Bansos Telah Disalurkan

Nanang Suryana Saputra - JABAR.INDONESIASATU.CO.ID

Jan 26, 2021 - 11:00



Selama pandemi, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menyalurkan bantuan social (bansos) untuk masyarakat sebanyak ratusan miliar di tahun 2020

MAJALENGKA - Selama pandemi, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menyalurkan bantuan social (bansos) untuk masyarakat sebanyak ratusan miliar di tahun 2020 kemarin. Penggelontoran dana tersebut untuk masyarakat yang

terdampak dari Covid-19.

Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd menyebutkan, anggaran tersebut sebanyak Rp600 miliar yang telah disalurkan. Artinya pos dan realisasi anggaran bansos merupakan paling besar di tahun lalu. "Jumlah tersebut terhitung secara keseluruhan sejak ditetapkannya pandemi hingga akhir tahun 2020," beber Karna, Senin (25/1).

Bupati mengungkapkan, bantuan itu tidak hanya digelontorkan oleh pemerintah daerah. Melainkan, bersumber juga dari bansos pemerintah pusat, provinsi, APBD Majalengka dan dana desa. "Dari APBD saja kita salurkan Rp33 miliar untuk bansos ini masing-masing sebesar Rp.600 ribu untuk 22 ribu kepala keluarga (KK) selama tiga bulan," jelasnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, dr H Gandana Purwana menambahkan, pihaknya menerima bantuan dari Kementerian Sosial RI untuk 139 ribu Kepala keluarga (KK).

Dari jumlah yang diajukan oleh admin desa 145 ribu KK, namun yang direalisasi setelah data diolah Kemensos, terkikis menjadi 139 ribu KK saja.

Gandana juga menyebutkan, dari jumlah tersebut 120 ribu KK di antaranya juga masuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal itu juga yang membuat adanya masyarakat yang mendapat lebih dari satu jenis bansos.

"Bantuan lainnya berasal dari pemerintah provinsi yang disalurkan melalui PT Pos berupa beras, telur dan sejumlah barang lainnya yang kemudian bantuan itu diganti dengan beras, vitamin, masker serta susu," tambahnya.

Disamping itu, BLT juga diberikan dari Kementerian Pertanian dan Kelautan yang dananya lebih besar mencapai Rp600 ribu per bulan. Namun penyalurannya tidak melibatkan dinas sosial. Penyaluran bantuan lainnya bersumber dari dana desa (DD).(***)